

## **KEBIJAKAN FISKAL UNTUK STABILITAS EKONOMI DI INDONESIA**

**Nadila<sup>1</sup>, Bagas Fakhri Maulana<sup>2</sup>**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [dnadila52@gmail.com](mailto:dnadila52@gmail.com)<sup>1</sup>, [bagassfakhri@gmail.com](mailto:bagassfakhri@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia dengan menggunakan indikator inflasi sebagai ukuran utama. Data yang digunakan berupa data sekunder kuartalan periode 2007–2023 yang meliputi variabel inflasi, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri. Metode yang digunakan adalah model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, utang luar negeri berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi, sementara pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif namun hanya signifikan secara marginal. Penerimaan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Di sisi lain, dalam jangka pendek, kenaikan pajak dan pengeluaran pemerintah terbukti efektif menurunkan tingkat inflasi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan kebijakan fiskal yang hati-hati dan terarah sebagai strategi untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal, Inflasi, Utang Luar Negeri, Pengeluaran Pemerintah, ARDL, Stabilitas Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis keuangan, pandemi, maupun fluktuasi harga komoditas. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian dan menjaga stabilitas makroekonomi. Ira et.al (2023) Kebijakan fiskal dan moneter memainkan peran penting dalam membentuk stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal melibatkan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan, pengeluaran publik, dan keputusan anggaran, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar.

Dalam mengukur kualitas kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi, maka inflasi menjadi salah satu tolak ukur untuk dijadikan aspek analisis secara menyeluruh dalam membahas stabilitas ekonomi. Inflasi merupakan kondisi dimana terjadinya kenaikan tingkat harga di masyarakat secara terus-menerus. Inflasi tinggi merupakan faktor utama dalam ketidakstabilan ekonomi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan nasional. Hal ini terjadi karena inflasi yang sangat tinggi menimbulkan tantangan dalam menjalankan kegiatan bisnis secara keseluruhan, karena meningkatkan biaya produksi, yang mengurangi daya saing perusahaan dan mengakibatkan penurunan produktivitas sehingga berdampak salah satunya terhadap stabilitas ekonomi (Pahimah & Ichsan, 2024).



*Sumber: World Bank*

Tingkat inflasi tahunan telah bervariasi, mencerminkan tren ekonomi domestik dan internasional. Pada tahun 2018, inflasi tercatat sebesar 3,20%, kemudian turun menjadi 3,03% pada tahun 2019. Penurunan ini terus berlanjut secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021, mencapai 1,92% dan 1,56% masing-masing, menunjukkan dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan permintaan domestik dan aktivitas ekonomi yang terkendala. Pada tahun 2022, inflasi mengalami kenaikan signifikan, mencapai 4,21%. Kenaikan ini disebabkan oleh kombinasi faktor global dan lokal, termasuk krisis energi, masalah rantai pasokan, dan perubahan harga bahan bakar lokal. Pada tahun 2023, inflasi mulai turun kembali menjadi 3,67%, mencerminkan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan peningkatan perekonomian nasional.

Dalam membahas efektifitas dari suatu negara Kebijakan fiskal merupakan instrumen kebijakan makroekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam perekonomian. Berbagai pilihan biasanya digunakan untuk menunjukkan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Menurut Manik (2024) kebijakan fiskal Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap permintaan agregat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan ini dapat meningkatkan pengeluaran dan investasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejarah pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah memanfaatkan alat ini untuk mengatasi berbagai krisis

ekonomi, termasuk krisis moneter pada akhir tahun 1990-an dan dampak resesi global pada tahun 2008.

Kebijakan fiskal menjadi salah satu upaya pemerintah untuk dapat mengelola aktifitas dalam bernegara salah satunya stabilitas ekonomi. Alat fiskal seperti pajak, pengeluaran konsumen, dan subsidi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengelolaan utang luar negeri dan biaya tenaga kerja perlu diperbaiki untuk menghindari gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal berperan penting dalam mengelola inflasi dan menjaga daya beli individu dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dalam hal ini kontribusi dan peranan tersebut menentukan kualitas perekonomian pada suatu negara yang didasari oleh aktifitas perekonomian yang terkontrol dan dikelola dengan baik dalam jangkauan pemerintah (Sari et al., 2024).

Proses menjalankan suatu kebijakan fiskal, sumber daya yang ada di dalam negeri tidak selalu mencukupi kebutuhan secara keseluruhan sehingga membutuhkan sumber daya lebih besar untuk mendorong optimalisasi stabilitas ekonomi. Pada teori Harrod-Domar, dalam Octavianti (2023) bahwa kekurangan tabungan domestik untuk mendukung pembangunan juga berkontribusi terhadap utang luar negeri di negara-negara berkembang. Investasi dan tabungan juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Namun, kekurangan sumber daya modal menghambat pembangunan, sehingga diperlukan dukungan keuangan dari sumber-sumber internasional. Sebagai salah satu faktor pendukung yang sangat penting kebijakan fiskal dalam hal utang luar negeri mendorong juga internasionalisasi dalam memberikan potensi stabilitas ekonomi secara optimal.

Memahami adanya pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Pengendalian inflasi sebagai langkah krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi menuntut peran strategis kebijakan fiskal. Alat-alat seperti pajak, pengeluaran pemerintah, dan Utang Luar Negeri (ULN) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi pergerakan harga di dalam ekonomi. Pajak memengaruhi daya beli konsumen dan proses produksi, pengeluaran pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan permintaan secara keseluruhan, dan pengelolaan utang luar negeri erat kaitannya dengan keseimbangan eksternal dan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan inflasi sangat penting untuk mengembangkan rencana ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil kajian dan analisis dari pengaruh efektifitas kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi guna menjadi sebab dan dasar dalam merumuskan kebijakan secara komprehensif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder runtut waktu (time series) dalam bentuk data kuartal tahunan selama periode 2007 – 2023 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini terdiri dari Inflasi, Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Utang Luar Negeri. Data inflasi yang digunakan adalah data tingkat inflasi di Indonesia, dinyatakan dalam bentuk satuan persen (%). Pada variabel pajak digunakan penerimaan pajak ialah realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Variabel pengeluaran pemerintah realisasi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Variabel utang luar negeri adalah total utang luar negeri di Indonesia, dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). ARDL merupakan model yang menggunakan waktu data pada waktu masa lampau dan masa sekarang yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikatnya. Model ARDL yaitu suatu model regresi yang memperhitungkan pengaruh waktu jangka panjang dan jangka pendek dari variabel terikat terhadap satu unit perubahan dalam nilai variabel penjelas

(Gujarati & Porter, 2012).

Persamaan umum model ARDL dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$INF_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_1 i \Delta INF_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_2 i \Delta TAX_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_3 i \Delta GE_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_4 i \Delta FD_{t-1} + \beta_1 TAX_t + \beta_2 GE_t + \beta_3 FD_t$$

Keterangan :

- INF : Inflasi  
 TAX : Pajak  
 GE : Pengeluaran Pemerintah  
 FD : Utang Luar Negeri  
 $\alpha_0$  : Konstanta  
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ : Koefisien regresi jangka pendek  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi jangka panjang  
 t : Tahun  
 i : Urutan Lag  
 $\varepsilon$  : Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Stasioneritas

#### Estimasi Model ARDL

Variabel	First Difference (p-value)	5% Critical Value	Kesimpulan
INF	0.0231	-2.917	Stasioner pada 1 <sup>st</sup> difference
ULN	0.0271	-2.917	Stasioner pada 1 <sup>st</sup> difference
Pajak	0.0071	-2.917	Stasioner pada 1 <sup>st</sup> difference
Pengeluaran Pemerintah	0.0085	-2.917	Stasioner pada 1 <sup>st</sup> difference

Berdasarkan hasil uji stasioneritas Dickey-Fuller (ADF), seluruh variabel penelitian INF, ULN, Pajak, dan Penegeluaran Pemerintah terbukti tidak stasioner pada level namun menjadi stasioner setelah diferensiasi pertama. Hal ini ditunjukkan oleh nilai statistik uji Z(t) yang lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat signifikansi 5%, serta p-value < 0.05 pada semua variabel setelah differencing pertama. Oleh karena itu, seluruh variabel tergolong ke dalam deret waktu terintegrasi orde satu yang secara metodologis memenuhi syarat untuk digunakan dalam estimasi model ARDL.

#### Estimasi Model ARDL (4,0, 1,1)

Komponen	Variabel	Koefisien	P-value	Keterangan
ADJ	ECT (L1 of INF)	-0.3232	0.000	Negatif signifikan → koreksi 32,3%/kuartal
<b>Long run</b>	ULN	0.00000238	0.037	Positif signifikan
	PAJAK	1.74e-06	0.582	Tidak signifikan
	Pengeluaran Pemerintah	3.63e-06	0.093	Negatif, signifikan 10%
<b>Short run</b>	$\Delta$ INF (LD)	0.3427	0.002	Positif signifikan
	$\Delta$ INF (L2D)	0.2505	0.029	Positif signifikan
	$\Delta$ INF (L3D)	0.2174	0.060	Marginal signifikan

	$\Delta$ PAJAK (D1)	-0.00001	0.000	Negatif signifikan
	$\Delta$ PENGELUARAN (D1)	-0.0000108	0.001	Negatif signifikan

Model ARDL yang diestimasi adalah ARDL(4,0,1,1) dengan variabel dependen inflasi (INF) dan variabel independen utang luar negeri (ULN), pajak serta pengeluaran pemerintah mencakup data kuartalan dari periode 2008q1 hingga 2023q4. Berdasarkan hasil regresi Koefisien penyesuaian (ECT) sebesar -0.3232 signifikan pada tingkat 1% ( $p = 0.000$ ). Ini berarti Jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, maka sebesar 32,32% dari ketidakseimbangan akan terkoreksi setiap kuartal. Berdasarkan hasil uji ARDL *Long Run Relationship* variabel ULN berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap inflasi ( $\beta = 0.00000238$ ;  $p = 0.037$ ), menunjukkan bahwa peningkatan utang luar negeri cenderung mendorong inflasi dalam jangka panjang. Variabel pajak memiliki koefisien positif namun tidak signifikan ( $p = 0.582$ ) → artinya tidak ada cukup bukti bahwa pajak memengaruhi inflasi dalam jangka panjang. Variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh negatif terhadap inflasi dengan signifikansi marginal ( $p = 0.093$ ), yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah cenderung menekan inflasi, meskipun pengaruh ini belum signifikan kuat secara statistik pada tingkat 5%.

Berdasarkan hasil uji ARDL *Short Run Dynamics* Tiga lag dari inflasi (L1 hingga L3) signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa inflasi bersifat autoregresif, di mana nilai-nilai masa lalu memiliki pengaruh terhadap kondisi saat ini. Variabel  $\Delta$ PAJAK dan  $\Delta$ PENGELUARAN keduanya berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek ( $p < 0.01$ ), yang berarti Kebijakan fiskal berupa peningkatan pajak dan belanja pemerintah efektif menurunkan inflasi dalam jangka pendek.

#### Uji Bound Test (Kointegrasi)

Statistik uji	Nilai	Nilai kritis (5%)	P-value	Keputusan
F-statistik	11.921	4.606	0.000	Tolak $H_0$
t-statistik	-4.925	-3.780	0.003	Tolak $H_0$

Berdasarkan hasil *Bounds Test*, ditunjukkan oleh nilai F-statistik sebesar 11.921 dan t-statistik sebesar -4.925, yang keduanya melampaui nilai kritis atas (I(1)) dari Kripfganz dan Schneider (2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang (cointegration) antara inflasi, utang luar negeri, pajak, dan pengeluaran pemerintah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menggunakan model ARDL terhadap data kuartalan 2007–2023, ditemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang (cointegration) antara inflasi, utang luar negeri, pajak, dan pengeluaran pemerintah, sebagaimana dibuktikan melalui uji Bounds Test yang signifikan. Dalam jangka panjang, utang luar negeri berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif namun marginal signifikan. Pajak tidak terbukti signifikan secara statistik. Dalam jangka pendek, kenaikan pajak dan pengeluaran pemerintah efektif menurunkan inflasi, menunjukkan efektivitas instrumen fiskal dalam merespons tekanan harga. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan kebijakan fiskal yang seimbang dan terarah untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics*. Pearson Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Manik, C. W., Silaban, K., Manurung, M. P., Situmorang, R. M., Sinambela, R. A., & Silaban, P. S.

- M. J. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat : Studi Kasus di Negara Indonesia. 2(1), 137–146.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Nurul, A., Siregar, H., & Lestari, D. (2024). Inflasi dan Stabilitas Ekonomi di Negara Berkembang: Tantangan dan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Makro dan Kebijakan Publik*, 19(1), 45–58.
- Octavianti, R. D. (2023). Determinan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1981-2020. 6(1), 57–64. <https://doi.org/10.12962/j27213862.v6i1.14336>
- Octavianti, R., Haryanto, T., & Suryanto, D. (2023). Pembangunan Ekonomi dan Ketergantungan pada Utang Luar Negeri di Negara Berkembang: Perspektif Teori Harrod-Domar. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 15(2), 101–115.
- Pahimah, N., & Ichsan. (2024). Pengaruh Utang Luar Negeri , Inflasi dan Net Ekspor terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 25(1), 84–96.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Perekonomian Indonesia Dampaknya Terhadap. 1(4), 1–10.
- Sari, M., Yusuf, A., & Laila, N. (2024). Peran Instrumen Fiskal dalam Mengendalikan Inflasi: Pajak dan Subsidi sebagai Alat Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Ekonomi Makro*, 21(2), 67–79.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- World Bank. (n.d.). Data inflasi Indonesia <https://data.worldbank.org>]